## STUDI PUSTAKA

# STUDI POTENSI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GARUT

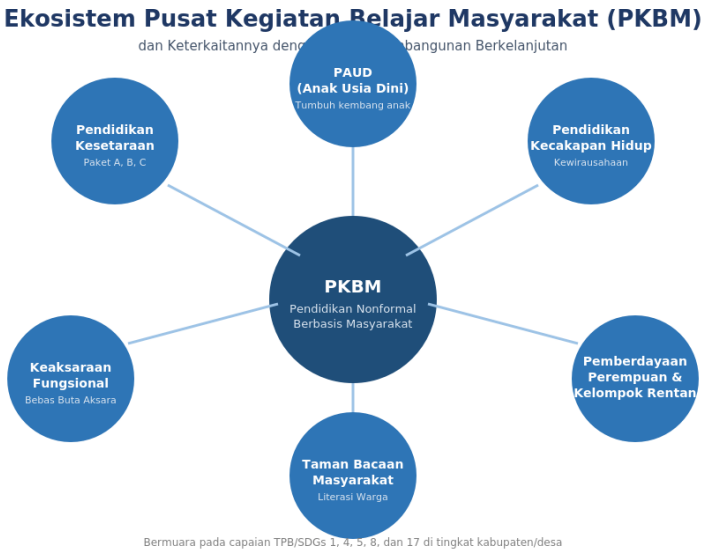


*Disusun berdasarkan penelusuran pustaka dari sumber daring (internet)*

2026

# ABSTRAK

Kajian ini menelaah sejauh mana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai satuan pendidikan nonformal dapat berperan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Garut. Penyusunan didasarkan pada studi pustaka atas dokumen daring, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan pemberitaan resmi yang membahas keberadaan PKBM serta kerangka TPB/SDGs di tingkat nasional maupun daerah. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Kabupaten Garut memiliki jumlah PKBM yang cukup besar dan tersebar hampir merata di seluruh kecamatan, namun pemanfaatan potensinya untuk mendukung capaian SDGs — khususnya SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan), SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas), SDGs 5 (Kesetaraan Gender), SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), serta SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) — masih dihadapkan pada persoalan tata kelola dan akuntabilitas program. Kajian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, integrasi data PKBM dengan basis data SDGs Desa, serta penajaman program agar kontribusi PKBM terhadap pembangunan berkelanjutan di Garut dapat lebih terukur.

*Kata kunci: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, pendidikan nonformal, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDGs, Kabupaten Garut.*

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan menempatkan pendidikan sebagai salah satu prasyarat utama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia, agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2016–2030 diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Di sisi lain, pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) telah lama hadir sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri, dengan cakupan layanan meliputi pendidikan kesetaraan, pendidikan anak usia dini, keaksaraan fungsional, taman bacaan masyarakat, hingga pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan.

Kabupaten Garut sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah geografis luas dan sebaran penduduk yang tidak merata memiliki kebutuhan besar terhadap layanan pendidikan alternatif di luar jalur formal. Berdasarkan data Dapodik Garut, tercatat sekitar 299 PKBM yang beroperasi dan tersebar di 42 kecamatan di Kabupaten Garut. Jumlah tersebut menunjukkan skala kelembagaan yang signifikan, sehingga secara teoretis PKBM memiliki daya ungkit besar terhadap pencapaian sejumlah sasaran TPB/SDGs di daerah, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun demikian, sejumlah pemberitaan dan temuan pemantauan masyarakat sipil di Garut turut mengungkap adanya persoalan tata kelola PKBM, seperti ketidaksesuaian data peserta didik dengan kondisi riil di lapangan dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan program.

Kesenjangan antara potensi kelembagaan yang besar dan persoalan implementasi di lapangan inilah yang melatarbelakangi perlunya kajian pustaka mengenai potensi PKBM dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Garut, sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah penguatan ke depan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi kelembagaan dan sebaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Garut berdasarkan sumber pustaka yang tersedia?
2. Bagaimana keterkaitan program-program PKBM dengan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya pada level kabupaten?
3. Apa saja tantangan tata kelola yang menghambat optimalisasi peran PKBM dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Garut?

## 1.3 Tujuan Kajian

4. Memetakan kondisi dan sebaran kelembagaan PKBM di Kabupaten Garut berdasarkan penelusuran pustaka daring.
5. Menganalisis keterkaitan fungsi dan program PKBM dengan capaian sasaran TPB/SDGs di daerah.
6. Mengidentifikasi tantangan tata kelola serta merumuskan rekomendasi penguatan peran PKBM.

## 1.4 Manfaat Kajian

Secara akademis, kajian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai peran pendidikan nonformal dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat kabupaten. Secara praktis, kajian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pendidikan, pemerintah desa, pengelola PKBM, dan pemangku kepentingan lain di Kabupaten Garut dalam merancang kebijakan penguatan PKBM yang lebih selaras dengan target TPB/SDGs.

## 1.5 Metode Penyusunan

Kajian disusun melalui metode studi pustaka (library research) dengan menelusuri sumber-sumber daring, meliputi jurnal ilmiah, artikel kebijakan, dokumen resmi pemerintah (peraturan perundang-undangan, data pokok pendidikan), portal data terbuka (satu data pemerintah daerah), serta pemberitaan media massa yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan keterkaitan antara kondisi PKBM di Kabupaten Garut dengan sasaran TPB/SDGs.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Konsep Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, dengan orientasi pemberdayaan potensi setempat guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Sihombing dan Gutama, PKBM adalah wadah tempat seluruh kegiatan belajar masyarakat berlangsung dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan, hobi, maupun bakat, yang dikelola dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat. Kamil (2011) menegaskan bahwa PKBM merupakan lembaga pendidikan di luar struktur formal yang mengarahkan pemberdayaan masyarakat, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri.

Tujuan didirikannya PKBM secara umum adalah menggali, menumbuhkan, mengembangkan, dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat, sehingga PKBM dapat menjadi tulang punggung proses pembangunan melalui pemberdayaan potensi lokal. Program-program yang lazim diselenggarakan PKBM meliputi pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C), pendidikan anak usia dini (PAUD), keaksaraan fungsional, taman bacaan masyarakat, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan kewirausahaan.

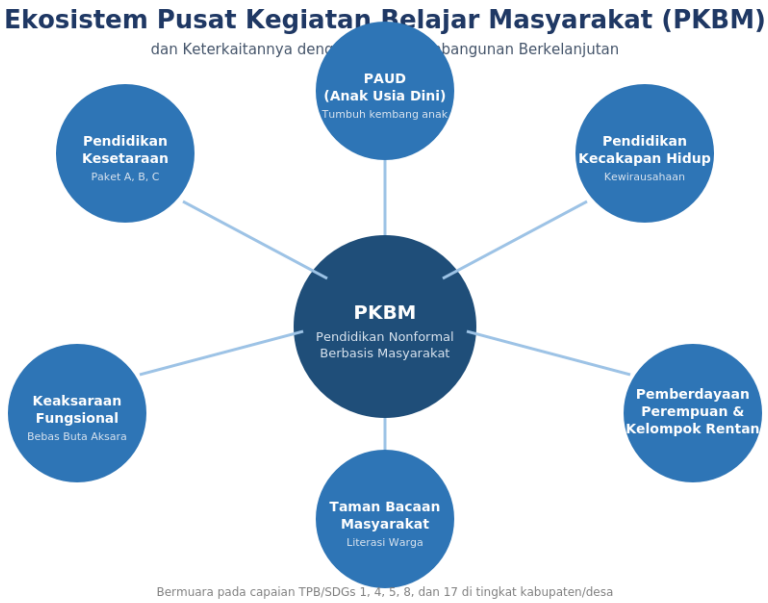


*Gambar 2.1 Ekosistem program PKBM dan keterkaitannya dengan pembangunan berkelanjutan*

## 2.2 Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati negara-negara anggota PBB pada September 2015 untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan hidup melalui 17 tujuan dan 169 target hingga tahun 2030. Ketujuh belas tujuan tersebut meliputi antara lain: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, hingga kemitraan untuk mencapai tujuan.

Di Indonesia, pelaksanaan TPB/SDGs diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Pada level desa, pendataan SDGs Desa turut menjadi basis data mikro yang digunakan dalam penyusunan RPJMDesa dan RKPDes, sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa.

## 2.3 Keterkaitan PKBM dengan Pencapaian TPB/SDGs

Sejumlah kajian kebijakan menunjukkan bahwa PKBM memiliki keterkaitan langsung dengan beberapa sasaran TPB/SDGs. Program pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional berkontribusi langsung pada SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas), sedangkan program pendidikan kewirausahaan dan kelompok usaha berkontribusi pada SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) sekaligus SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan). Program pemberdayaan perempuan yang banyak diselenggarakan PKBM turut relevan dengan SDGs 5 (Kesetaraan Gender), sementara kolaborasi PKBM dengan pemerintah desa dan dinas terkait mencerminkan prinsip SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Data hasil Pendataan SDGs Desa bahkan disebutkan dapat dimanfaatkan sebagai basis pengembangan program PKBM agar lebih tepat sasaran.

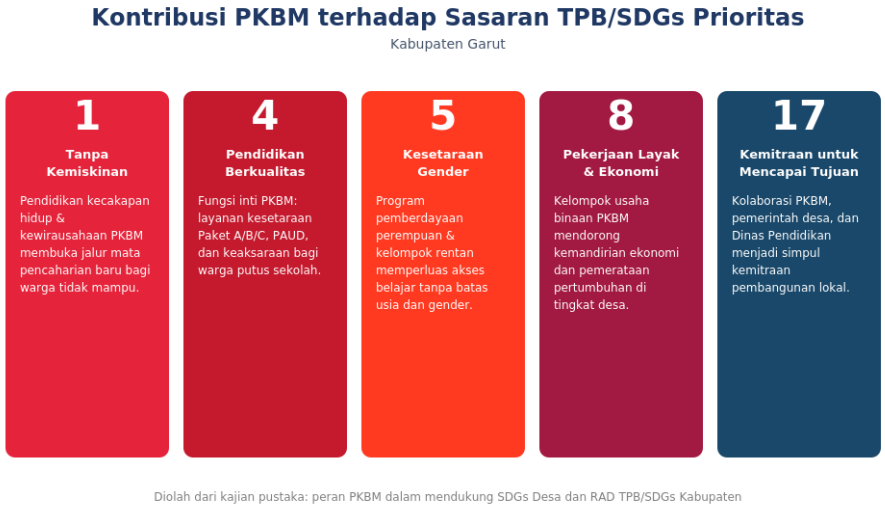


*Gambar 2.2 Pemetaan kontribusi program PKBM terhadap sasaran TPB/SDGs prioritas*

# BAB III GAMBARAN UMUM PKBM DI KABUPATEN GARUT

## 3.1 Sebaran dan Skala Kelembagaan

Berdasarkan data Dapodik Garut yang dikutip dalam pemberitaan lokal, jumlah PKBM yang tercatat aktif di Kabupaten Garut mencapai 299 lembaga yang tersebar di 42 kecamatan. Skala ini menempatkan PKBM sebagai salah satu simpul pendidikan nonformal terbesar di Jawa Barat, mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Garut yang tercatat sebesar 2.585.607 jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020. Sebaran PKBM yang menjangkau hampir seluruh kecamatan secara teoretis memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan alternatif, terutama bagi warga yang tidak dapat menempuh pendidikan formal.

## 3.2 Kerangka Regulasi Penyelenggaraan

Penyelenggaraan PKBM di Kabupaten Garut merujuk pada sejumlah peraturan berjenjang, di antaranya Peraturan Pemerintah tentang pendirian satuan pendidikan nonformal, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai standar isi program pendidikan kesetaraan, serta Peraturan Bupati Garut mengenai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal. Proses perizinan operasional PKBM di tingkat kecamatan umumnya memerlukan rekomendasi dari koordinator wilayah bidang pendidikan setempat sebelum diterbitkan izin oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

## 3.3 Tantangan Tata Kelola

Di balik skala kelembagaan yang besar, sejumlah sumber menunjukkan adanya kesenjangan antara data administratif dan kondisi riil penyelenggaraan PKBM di lapangan. Pemantauan yang dilakukan kelompok masyarakat sipil di Garut menemukan indikasi ketidaksesuaian antara jumlah peserta didik yang tercatat dalam Dapodik dan jumlah riil di lapangan, serta laporan warga mengenai kegiatan belajar-mengajar yang minim bahkan tidak berjalan di sejumlah PKBM. Kondisi ini menjadi catatan penting karena besarnya alokasi anggaran, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dikucurkan untuk program PKBM di Kabupaten Garut.

Persoalan tata kelola semacam ini berpotensi mengikis kontribusi nyata PKBM terhadap pencapaian TPB/SDGs, sebab keberhasilan pencapaian target SDGs sangat bergantung pada keandalan data serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan, bukan semata pada besaran angka kelembagaan yang tercatat secara administratif.

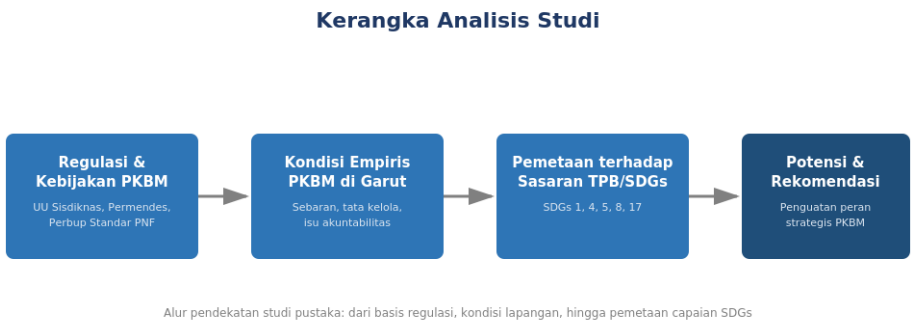


*Gambar 3.1 Kerangka analisis kajian: dari basis regulasi, kondisi empiris, hingga pemetaan SDGs*

# BAB IV ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PKBM TERHADAP SDGs DI GARUT

## 4.1 Potensi Kontribusi terhadap Sasaran Prioritas

Menelaah keterkaitan antara fungsi PKBM dan sasaran TPB/SDGs, kajian ini mengidentifikasi lima sasaran yang paling relevan dengan konteks Kabupaten Garut sebagaimana diuraikan pada Gambar 2.2, yaitu SDGs 1, 4, 5, 8, dan 17. Program kesetaraan dan keaksaraan fungsional PKBM secara langsung mengisi kesenjangan capaian SDGs 4 di wilayah dengan angka putus sekolah yang masih memerlukan intervensi. Program kecakapan hidup dan kewirausahaan berpotensi memperkuat SDGs 8 dan SDGs 1 apabila dikelola secara konsisten dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar pemenuhan syarat administratif.

## 4.2 Faktor Penghambat Optimalisasi

- Ketimpangan antara data administratif (Dapodik) dan kondisi riil penyelenggaraan program di sejumlah PKBM.
- Lemahnya pengawasan dinas terkait terhadap efektivitas kegiatan belajar-mengajar di lapangan.
- Minimnya integrasi antara perencanaan program PKBM dengan data hasil Pendataan SDGs Desa yang semestinya dapat menjadi basis penajaman sasaran program.
- Terbatasnya kemitraan strategis antara PKBM, pemerintah desa, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain dalam mendukung keberlanjutan program.

## 4.3 Implikasi terhadap Pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Garut

Dengan mempertimbangkan skala 299 PKBM yang tersebar di seluruh kecamatan, potensi kontribusi kelembagaan ini terhadap RAD TPB/SDGs Kabupaten Garut sesungguhnya besar. Namun, tanpa perbaikan tata kelola, potensi tersebut berisiko tidak termanfaatkan secara optimal, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas anggaran yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap program pendidikan nonformal itu sendiri.

# BAB V PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

7. Kabupaten Garut memiliki skala kelembagaan PKBM yang besar, yaitu 299 lembaga yang tersebar di 42 kecamatan, sehingga secara struktural berpotensi besar mendukung pencapaian TPB/SDGs di daerah.
8. Program-program PKBM memiliki keterkaitan konseptual yang jelas dengan sejumlah sasaran TPB/SDGs, terutama SDGs 1, 4, 5, 8, dan 17.
9. Realisasi potensi tersebut masih dihadapkan pada tantangan tata kelola, terutama ketidaksesuaian data dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan program di lapangan.

## 5.2 Rekomendasi

10. Penguatan sistem pengawasan dan verifikasi data PKBM oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut secara berkala.
11. Integrasi perencanaan program PKBM dengan data hasil Pendataan SDGs Desa agar sasaran program lebih tepat dan terukur.
12. Penguatan kemitraan lintas pemangku kepentingan (pemerintah desa, dunia usaha, akademisi) guna mendukung keberlanjutan program PKBM.
13. Perlunya kajian lapangan lanjutan untuk memvalidasi temuan studi pustaka ini dengan data primer di tingkat kecamatan.

# DAFTAR PUSTAKA

BAN PAUD & PNF. (2019). Konsep Pendidikan Nonformal. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal.

BPS Kabupaten Garut. Education – Statistical Data. Diakses dari https://garutkab.bps.go.id/en/statistics-table?subject=521

Data.go.id. Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Diakses dari https://data.go.id/dataset/dataset/jumlah-pusat-kegiatan-belajar-masyarakat-pkbm1

Ejournal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mendukung Pembangunan Desa Berkelanjutan Berbasis SDGs Desa. Diakses dari https://ejournal.kemendesa.go.id/index.php/artikelkebijakan/article/view/32

Jabar Bicara. (2026). Potret Gelap PKBM di Garut. Diakses dari https://www.jabarbicara.com/2026/04/09/potret-gelap-pkbm-di-garut/

Kajianpustaka.com. (2022). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Diakses dari https://www.kajianpustaka.com/2022/09/pusat-kegiatan-belajar-masyarakat-pkbm.html

Kamil, M. (2011). Pendidikan Nonformal: Pengembangan melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Kampung KB. PKBM. Diakses dari https://kampungkb.kemendukbangga.go.id/kampung/79753/intervensi/2747344/pkbm

Kemendikdasmen. Data Induk Satuan Pendidikan Kab. Garut. Diakses dari https://data.kemendikdasmen.go.id/data-induk/satpen/020000/021100

Kompasiana. (2023). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Diakses dari https://www.kompasiana.com/elsaaa21/658ad1ce12d50f59fc090b42/pusat-kegiatan-belajar-masyarakat-pkbm

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

PKBM Wijaya Kusuma. Pengertian PKBM. Diakses dari https://pkbmwijayakusuma.org/2019/04/19/pengertian-pkbm/

PSPPR UGM. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Diakses dari https://psppr.ugm.ac.id/?p=1431

Sekretariat Kabinet RI. (2017). Inilah Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs. Diakses dari https://setkab.go.id/

Sihombing, U. & Gutama. (2000). PKBM sebagai Wadah Kegiatan Belajar Masyarakat. Jakarta: Yayasan Nuansa.

Tim Basics. (2004). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai Satuan Pendidikan Nonformal. Jakarta: Depdiknas.

Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. Apa Itu PKBM? Diakses dari https://www.ybkb.or.id/apa-itu-pkbm/

Yulaelawati, E. (2011). Pendidikan Nonformal untuk Semua. Jakarta: Kemendikbud.

Zuriah, N. (2016). Pendidikan Nonformal dan Pemberdayaan Masyarakat. Malang: UMM Press.